

ABSTRAK

Ani Swindawati. 2026. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Pelaku Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mjy). Skripsi. Program Studi Hukum, FH, Universitas PGRI Madiun. Pembimbing (I) Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H. (II) Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak buruk pada kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban sehingga memerlukan perlindungan hukum yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mjy dengan ketentuan hukum positif serta menilai apakah pertimbangan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku persetubuhan anak dalam putusan tersebut secara formil sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku karena didasarkan pada pembuktian alat bukti yang sah. Namun, kebaruan penelitian ini menemukan bahwa hakim sama sekali belum mencantumkan Pasal 59 dan Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai perlindungan khusus serta pemulihan korban sebagai dasar pertimbangan hukum putusan tersebut. Kedua, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dinilai belum optimal dalam mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi anak korban. Hal ini dikarenakan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) belum diintegrasikan secara komprehensif di dalam putusan. Oleh karena itu, aspek perlindungan khusus dan pemulihan psikologis anak perlu dioptimalkan dalam pertimbangan hakim guna mewujudkan keadilan substantif yang berorientasi pada pemulihan korban anak.

Kata Kunci: Persetubuhan terhadap Anak, Kepastian Hukum, Keadilan, Perlindungan Anak, *Best Interests of the Child*.

ABSTRACT

Ani Swindawati. 2026. Juridical Analysis of Judges' Legal Considerations in Imposing Criminal Sanctions on Offenders of Sexual Intercourse with Minors (A Case Study of the Decision of the District Court of Madiun Regency Number 28/Pid.Sus/2022/PN Mjy). Law Department, Universitas PGRI Madiun. Supervisor (I) Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H. (II) Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.

The criminal offense of sexual intercourse with a child constitutes an extraordinary crime that has severe physical, psychological, and social impacts on victims, thereby requiring optimal legal protection. This study aims to analyze the conformity of the judge's legal considerations in the Decision of the Madiun Regency District Court Number 28/Pid.Sus/2022/PN Mjy with the applicable positive law and to assess whether such considerations reflect the principles of justice and legal certainty in providing legal protection for child victims. This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The research data were collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive method. The results of this study indicate that, first, the judge's legal considerations in imposing criminal sanctions on the perpetrator of sexual intercourse with a child formally comply with the applicable positive law, as they are based on legally admissible evidence. However, the novelty of this research reveals that the judge did not incorporate Article 59 and Article 69 of the Child Protection Law concerning special protection and victim recovery as legal grounds in the court's reasoning. Second, the judge's legal considerations in imposing criminal sanctions have not been optimal in reflecting the principles of justice, legal certainty, and legal protection for child victims. This is because the principle of the best interests of the child has not been comprehensively integrated into the judgment. Therefore, aspects of special protection and the psychological recovery of child victims should be further incorporated into judicial reasoning in order to achieve substantive justice that is oriented toward the recovery of child victims.

Keywords: Sexual Intercourse with a Child, Legal Certainty, Justice, Child Protection, Best Interests of the Child.